



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA NURYANTI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 215941

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 16.880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/485 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
2. Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 565 m2/500 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1203 m2/400 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/160 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 975.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000



3. MOBIL, HONDA HATCH BACK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000
4. MOBIL, HONDA ALL NEW CITY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.410.541.178
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	32.265.541.178
III. HUTANG	Rp.	1.316.114.595
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	30.949.426.583

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.